

Daftar Pustaka

- Andira, A. (2018). *Analisis Kinerja Keuangan Pada Badan Pengelolah Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang. skripsi.*
- Aulia, Z. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Timur Periode 2011-2015. *Skripsi.*
- Dewi, S. (2015). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi (Studi di Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2009-2013). *JOMFekom*, 2(2), 1–15.
- Dharmawati, M. K. (2015). *Digital Repository Universitas Jember*
- Fahmi, Irham. 2012. Analisis kinerja Keuangan. Alfabeta. Bandung.
- Fathah, R. N. (2017). Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Ebbank*, 8(1), 33–48.
- Faud, moh. Ramli. 2016. Analisis laporan Keuangan pemerintah daerah. Ghailia Indonesia. Bogor
- Ghozali, I., & Chariri, A. (2006). Intellectual Capital dan Kinerja Keuangan Perusahaan; Suatu Analisis Dengan Pendekatan Partial Least Squares. *Simposium Nasional Akuntansi XI*, 1(19), 1–31.
- Halim, Abdul. 2012. Akuntansi Sektor Publik, akuntansi Keuangan Daerah. Slemba Empat. Jakarta.
- 2009. Problem Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat-Daerah, Peluang dan Tantangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Daerah. Sekolah Pasca Sarjana UGM. Yogyakarta.
- 2007 Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat. Jakarta.
- Hery. 2015. Analisis Keuangan Pendekatan Rasio Keuangan. Caps Yogyakarta.
- Lampa, Lady, & Sabijono, H. (2016). Analisis Kinerja Pendapatan Pada Dinas Pengelolah Keuangan Asset dan Pendapatan Kabupaten Minahasa Selatan. *EMBA*, 4(1), 56–66.
- Magdalena, M., & Kurniawan, C. H. (2013). Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Di Indonesia. *Modus*, 25(1), 91–106.
- Mahmudi. 2010. Manajen Keuangan Daerah. PT. Erlangga: Jakarta.
- Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mahsun, Mohamad. 2016. pengukuran Kinerja Sektor Publik. BPFE-YOGYAKARTA. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan daerah. yogyakarta.
- Marlia, I. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Lampung Tahun 2013-2017 dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Raden Intan Repository*, 1–55.
- Norma. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang. *Skripsi*, 54–67.
- PP No. 71 Tahun 2010. Penerapan SAP Berbasis Akrual Dapat di Laksanakan Secara

Bertahap

PP No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Putri, I. N. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 3–107.

Rahmayati, A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013. *Eka Cida*, 1(1), 40–54.

Rusherlistyanti, R., & Dwijayanti, R. (2013). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Propinsi Seindonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pekalongan*, 12(1), 43–66.

Sadjiarto, A. (2000). Akuntabilitas Dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 138–150.

Sumarjo, Hendro. 2010. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Dearah (Studi Empiris Pada Pemerintah Dearah Kabupten/Kota di Indonesia). Skripsi.

Syamsi, Ibnu. 1986. Dasar-Dasar Kebikjaksanaan Keuangan Negara. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.

UU No. 33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

UU No. 9 Tahun 2015. Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

UU Pasal 23E. Untuk Memeriksa Pengelolaan dan Tangungjawab Tentang Keuangan Negara di Adakan Satu Badan Pemeriksaan Keuangan Yang Bebas Dan Mandiri.

UU No.23 Tahun 2014. Tentang Pemerintahan Daerah.

Wakhyudi & Tarunasari, L.F. 2013. Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Melalui Rasio Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*. Vol.1. No.2